

DANA SUMBANGAN MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI PASCA BENCANA MERAPI

*Oleh: Theresia Tuti Andayani**

Theresia Tuti Andayani, (2011), Dana Sumbangan Masyarakat Untuk Pembangunan Ekonomi Pasca Bencana Merapi, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 2 Nomor 1, Tahun 2011, hal 41-49, 1 tabel.*

Abstract

Merapi eruption that occurred in October until November 2010 is still fresh in memory. The disaster claimed many local inhabitants as victims and many others had to be evacuated. Some parts within four districts i.e. Sleman, Klaten, Boyolali, and Magelang are prone areas because of the closed-distance to Merapi Volcano.

At the moment, there is ongoing process of rehabilitation and reconstruction post disaster. The process will have taken within next two until three years. The eruption has caused damages and losses until trillion of rupiah, mostly in sectors of housings, infrastructures, economics, social, and other cross-sectors.

Rehabilitation and reconstruction programs have been conducted in post disaster. Meanwhile several various assistances have been distributed to beneficiaries. The assistances were donated by Indonesian National Disaster Management Agency, some ministries of Republic of Indonesia, and local, national and international community as well.

In this article, a case of study is conducted in relation with disaster management of Merapi in District of Sleman, Province of D.I. Yogyakarta. The study is focused on tracking community funds donated from different organizations and institutions, and Indonesian communities as well.

The writer starts in explaining chronology of the Merapi eruption from the beginning to the recent situation. It is started from Merapi Volcano with status of "NORMAL", "WASPADA", "AWAS", and then followed with erupting and vomiting hot lava.

Total loss on economical sector reaches Rp 1.068 trillion because of the eruption. Besides, affected-area of Merapi covering National Park of Merapi Volcano is also damaged. Total loss of the damage of the park is around Rp 3.386 trillion. Meanwhile, total loss of infrastructure is Rp 4.965 billion. Moreover, the losses are also from social, housing, and other sectors.

Keywords: *Merapi eruption, community fund, rehabilitation and reconstruction*

1. PENGANTAR

Masih teringat jelas dalam pikiran kita peristiwa erupsi Merapi yang terjadi pada Oktober-November 2010, kondisinya begitu tiba-tiba dan menghancurkan sebagian wilayah Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang. Peristiwa itu sungguh menggetarkan

kita, bahwa kekuatan manusia itu terkalahkan dengan kekuatan alam. Tercatat ketika itu, ada sekitar 350 lebih korban meninggal dunia, ratusan jiwa yang mengalami luka bakar dan trauma psikologis.

Kini, saatnya perlu dilakukan proses rehabilitasi pasca bencana yang tentu saja akan memakan waktu hingga 2-3 tahun ke depan. Erupsi Merapi telah menelan kerusakan dan kerugian triliunan rupiah. Terutama dalam sektor pemukiman, infrastruktur, perekonomian, sosial dan lintas sektor.

* Penulis adalah Jurnalis di Harian Pagi Tribun Jogja, Regional Newspaper Kompas Media Group.

Untuk mengatasi program rehabilitasi pasca bencana, berbagai bantuan telah digelontorkan diantaranya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan sinergitas dari seluruh Kementerian RI. Di samping itu bantuan-bantuan dari masyarakat terhadap korban bencana juga tidak sedikit. Hampir sebagian besar media massa baik cetak maupun elektronik membuka rekening untuk mengumpulkan dana masyarakat. Kita tidak mengetahui berapa besar dana seluruhnya yang disumbangkan masyarakat tersebut.

2. METODE PENELITIAN KUALITATIF

Dalam menelusuri kasus tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi di permukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

3. METODE PENGUMPULAN DATA

Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

3.1. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

3.2. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

3.3. *Investigative Reporting*

Lazim disebut dengan reportase investigasi, ini merupakan salah satu yang paling populer dalam sistem pencarian berita. Reportase investigasi adalah sebuah jenis reportase di mana si wartawan berhasil menunjukkan siapa yang salah, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, yang seharusnya jadi terdakwa, dalam suatu kejahatan publik yang sebelumnya dirahasiakan. Dalam hal ini saya terapkan untuk menelusuri ke mana dana sumbangan masyarakat bagi korban Merapi itu digulirkan selama ini ?

Kronologi erupsi dan letusan

No	Waktu	Keterangan
1	20 September 2010	Status Gunung Merapi ditingkatkan dari normal menjadi waspada
2	21 Oktober 2010	Status Merapi menjadi siaga
3	25 Oktober 2010	Status Merapi menjadi awas Warga terutama ibu hamil, anak balita, lansia, mulai dievakuasi ke barak pengungsian. Telah disiapkan 7 barak pengungsian yakni Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo, Hargobinangun, Purwobinangun, Girikerto dan Wonokerto. Pemkab Sleman telah siapkan sarana transportasi di wilayah Cangkringan, Desa Kepuharjo 10 truk, Umbulharjo 10 truk, Glagaharjo 7 truk, Kecamatan Turi Wonokerto 6 truk, Girikerto 6 truk dan swadaya dari masyarakat sendiri.
4	26 Oktober 2010	Gunung Merapi meletus. Sebanyak 40 orang tewas. (sumber : slemankab.go.id) warga yang berada di lokasi kawasan rawan bencana diungsikan ke barak-barak pengungsian.
5	3 November 2010	Terjadi awan panas besar selama 1,5 jam. Dilaporkan bahwa awan panas mencapai 9 km di alur sungai Gendol. Daerah aman di luar radius 15 km dari puncak Merapi.
6	5 November 2010	Gunung Merapi Erupsi, 222 jiwa meninggal dunia. Wilayah yang aman bagi para pengungsi diubah dari radius 15 km, menjadi di luar radius 20km dari puncak Gunung Merapi.
7	19 November 2010	Terhitung 19 November 2010 pukul 12.00 WIB, wilayah yang aman bagi para pengungsi adalah sebagai berikut : Kabupaten Sleman, sebelah timur Kali Boyong di luar 15 km, sebelah barat kali Boyong di luar 10 km dari puncak Merapi. Kabupaten Boyolali di luar 5 km dari puncak Merapi Kabupaten Klaten di luar 10 km dari Puncak Gunung Merapi.
8	3 Desember 2010	Terhitung sejak 3 Desember 2010, Status Gunung Merapi diturunkan menjadi siaga. Namun demikian penanganan masih bersifat tanggap darurat mengingat masih adanya ancaman lahar dingin.

Apakah ada penyimpangan dana sumbangan atau tidak ?

I. Erupsi Gunung Merapi Telan Kerugian Triliun Rupiah

Setelah gunung Merapi meletus yang terakhir pada tahun 2006, pada tahun 2010 lalu Merapi meletus lagi dengan intensitas letusan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan erupsi tahun 2010 merupakan tipe letusan dan erupsi periode 100 tahunan. Pada Oktober dan November 2010 terjadi erupsi dan letusan yang membawa korban baik harta maupun jiwa manusia.

Sampai dengan saat ini status Merapi masih dalam kondisi siaga. Setelah sebelumnya dinyatakan

awas pada dan berakhir pada 3 Desember 2010. Pada 26 Oktober 2010 terjadi erupsi besar, lalu disusul pada 5 November. Letusan pada tahun 2010 ini banyak menimbulkan kerusakan, kerugian dan korban.

Erupsi Gunung Merapi yang berlangsung tiada henti selama tiga minggu menyisakan kerusakan dan kehilangan aset-aset kehidupan masyarakat dalam skala luas dan massif. Proses pemulihan sosial, ekonomi, fisik, pendidikan, kesehatan dan psikologis masyarakat akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga diperlukan sinergitas sumber daya pemerintah dan non pemerintah, baik dalam negeri maupun melalui kerjasama internasional. Letusan Merapi pada Selasa, 26 Oktober 2010 telah meluluhlantakan Dusun Kinahrejo yang sangat hijau,

damai dan memiliki nilai ekonomi pertanian yang sangat tinggi, khususnya peternakan sapi perah. Kehancuran dusun Kinahrejo itu terjadi karena perilaku awan panas yang keluar dari jalur lama (menyusur kali Gendol) dan telah membuka jalur baru melintas dan menerjang Dusun Kinahrejo tepat pada titik tengah dan bujur desa (utara-selatan). Perubahan jalur awan panas ini memberikan indikasi ke depan bahwa Dusun Kinahrejo, Pelemsari dan Ngrangkah di masa depan akan menjadi jalur reguler awan panas Merapi. Fenomena baru ini tentu harus diantisipasi oleh berbagai pihak.

Meskipun saat ini status Merapi sudah diturunkan dari Awasi menjadi Siaga. Namun masyarakat dihadapkan pada ancaman bahaya sekunder berupa lahar dingin. Dari hasil survey dan data yang diperoleh sedikitnya ada 6 kecamatan yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana antara lain Kecamatan Tempel, Ngaglik, Kalasan, Prambanan, Berbah, dan Mlati. Bahaya sekunder tersebut tidak kalah dahsyatnya dengan erupsi Gunung Merapi karena saat ini ada sekitar 140 juta meter kubik material vulkanik yang dikeluarkan dari gunung Merapi dan juga memenuhi sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

Secara makro banyak masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung akibat bencana erupsi Gunung Merapi, baik itu korban jiwa, psikologis maupun ekonomi. Tidak sedikit korban kehilangan pekerjaan yang berakibat pada perekonomian di beberapa daerah. Selain itu, anak-anak belum bisa bersekolah secara normal, jasa wisata lumpuh, koperasi terancam likuidasi dan pelayanan publik seperti penerbangan pesawat terganggu. Sebanyak ratusan warga tewas, ratusan warga lain harus dirawat di rumah sakit. Ribuan ternak mati, sementara ribuan hektar lahan pertanian hancur, hutan lindung dan hutan masyarakat dalam skala ribuan hektar juga telah hangus oleh awan panas. Selain itu, ribuan rumah yang dihuni sekitar 2.400 keluarga luluh lantak dan rusak, puluhan dusun hancur dan ekosistem lereng selatan Merapi mengalami perubahan bentuk yang sangat radikal akibat daya jangkau awan panas yang mencapai sekitar 15 kilometer dari puncak.

Erupsi gunung Merapi (Oktober-November

2010) telah mengakibatkan kerusakan serta kerugian yang berdampak langsung terhadap sistem jaringan infrastruktur terutama di wilayah sekitar Gunung Merapi. Penilaian kerusakan dan kerugian infrastruktur meliputi jalan, jembatan, bandara, terminal, kendaraan, gedung pemerintah, air bersih, bendungan, irigasi, sungai, mata air, serta komunikasi dan informasi. Nilai kerusakan infrastruktur itu sebesar Rp219,461 miliar atau sekitar 24,54% dari total kerusakan sedangkan nilai kerugian adalah sebesar Rp4,965 miliar atau sekitar 0,11% dari nilai total kerugian. Adapun nilai total kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp224,427 miliar atau sekitar 4,15% dari nilai total kerusakan dan kerugian.

Dampak erupsi Merapi juga terjadi pada sektor sosial dan melumpuhkan beberapa fasilitas sosial seperti Puskesmas, tempat ibadah, sekolah, gedung pertemuan, serta lembaga sosial budaya lainnya. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap fasilitas sosial yang mengalami kerusakan sehingga potensi pendapatan dan pemasukan retribusi dan fasilitas sosial terhenti. Nilai kerusakan sektor sosial adalah sebesar Rp29,371 miliar atau sekitar 3,28 % dari total nilai kerusakan, sedangkan nilai kerugian dari sektor sosial adalah sebesar Rp20,268 miliar atau sekitar 0,45% dari total nilai kerugian. Adapun total nilai kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp49,639 miliar atau sebesar 0,92% dari nilai total kerusakan dan kerugian.

Bencana erupsi Gunung Merapi telah melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Gunung Merapi terutama saat mulai ditetapkannya status Gunung Merapi menjadi awasi akibat peningkatan aktivitas gunung Merapi yang semakin intensif. Letusan dahsyat beserta material-material vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi telah menghancurkan sebagian besar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sleman bagian utara, terutama daerah lereng Merapi. Selain menghancurkan lahan pertanian, letusan gunung Merapi juga merusak sarana, prasarana ekonomi lainnya, sehingga masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

Munculnya kerugian pada sektor ekonomi terjadi akibat terhentinya proses produksi maupun

potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh masyarakat. Guna diketahui besaran kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan pada sektor ekonomi, maka dilakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi dengan menilai kerusakan dan kerugian tersebut ke dalam satuan uang rupiah serta mengacu pada sistem harga yang berlaku saat ini,

Nilai kerusakan sektor ekonomi mencapai Rp193,437 miliar atau sekitar 21,63% dari total kerusakan. Sedangkan nilai kerugian sektor ekonomi adalah sebesar Rp1,068 triliun atau sekitar 23,67% dari total kerugian. Adapun nilai total kerusakan dan kerugian sektor ekonomi adalah Rp1,261 miliar atau sekitar 23,33%. Penilaian terhadap kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi diuraikan ke dalam sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, industri kecil, rumah tangga dan koperasi. Kerusakan dan kerugian fasilitas ekonomi berupa pasar, peternakan, pariwisata, keuangan dan perbankan termasuk akibat tidak berfungsinya sarana tersebut.

Selain sektor tersebut penilaian kerusakan dan kerugian juga dilakukan terhadap sub sektor lingkungan hidup, pemerintahan, ketertiban dan keamanan, serta tata ruang. Namun lebih dititikberatkan pada kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) karena memegang peranan penting bagi keseimbangan ekosistem wilayah secara lebih luas. Nilai kerusakan pada sektor ini mencapai Rp5,755 miliar atau sekitar 0,68% dari total kerusakan sedangkan nilai kerugian adalah sebesar Rp3,386 triliun atau sekitar 74,48%.

Saat ini di wilayah Kabupaten Sleman, terutama di sekitar kawasan Gunungapi Merapi telah disusun beberapa dokumen perencanaan tata ruang. Namun pola aliran lava maupun lahar yang keluar dari letusan Gunung Merapi telah berubah sehingga kawasan rawan bencana perlu disesuaikan yang pada akhirnya dokumen-dokumen perencanaan perlu disesuaikan juga. Besaran nilai kerugian untuk penyusunan dan penyesuaian dokumen rencana tata ruang diperkirakan senilai Rp1,8 miliar.

Kejadian ini sudah ditindaklanjuti dengan proses pemulihan baik secara fisik maupun non fisik terhadap fasilitas umum dan sosial serta pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki keadaan para korban

erupsi Merapi. Pemkab Sleman dalam hal ini juga telah berusaha memulihkan kondisi daerah-daerah yang terkena dampak erupsi Merapi. Pertimbangan atas keamanan fisik warga di lokasi bencana merupakan salah satu langkah yang diambil untuk dilakukan program pemukiman kembali. Mengingat perilaku Gunungapi Merapi tahun 2010 lalu menjadi yang terbesar setelah tahun 1911.

II. Recovery Pasca bencana Merapi

Recovery pasca bencana dimulai dari pemulihan dini (*early recovery*) kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan dini adalah serangkaian kegiatan mendesak yang harus segera dilakukan pada saat berakhirnya masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kegiatan pemulihan dini diarahkan pada pemulihan aspek penghidupan (mata pencaharian) dan kehidupan masyarakat, dengan mempertimbangkan dan berfungsinya layanan publik. Pemulihan dini akan diselesaikan maksimal 5 bulan terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai bulan April 2011.

Menurut PP Nomor 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, bahwa definisi rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihannya semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana, kelembagaan dan wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya demi tegaknya hukum dan ketertiban. Serta bangkitnya peran masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rehabilitasi pascabencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman dilaksanakan sampai dengan bulan ketujuh sejak bulan Januari 2011, sedangkan rekonstruksinya dilaksanakan sampai dengan tahun 2013 dan maksimal sampai 2014. Kebijakan recovery pasca bencana erupsi Merapi berdasarkan sektor permukiman, infrastruktur, sosial, perekonomian dan

lintas sektor.

A. Sektor permukiman

Mengingat luncuran awan panas menyebabkan kerusakan permukiman warga yang tidak sedikit, maka kebijakan pemulihan dini di sektor permukiman ditekankan pada pembuatan hunian sementara (huntara/shelter). Huntara dibangun di atas tanah tanah kas desa untuk masa tinggal selama 1 tahun.

Huntara dibangun bagi pengungsi yang tempat tinggalnya hancur total atau tanahnya tidak mungkin dibangun lagi dalam waktu dekat. Maka untuk sementara waktu mereka tinggal di huntara, sebelum warga korban Letusan Merapi itu mampu mandiri. Selain itu untuk memberikan privatisasi kepada warga korban Merapi agar lebih nyaman dibanding di barak pengungsian. Hunian Sementara (huntara) yang sudah terbangun itu di Dusun Plosokerep, Desa Kepuharjo Cangkringan sudah ada 110 KK (luas 10 ha pada radius 9,3 km dari puncak Merapi untuk 830 KK), di Dusun Banjarsari, Desa Wukirsari Cangkringan 284 KK (luas 7,5 ha radius 11,5 km dari puncak Merapi untuk relokasi 837 KK). Kemudian di Dusun Gondang, Desa Argomulyo sudah ada 141 KK yang menempati, dan di Dusun Kowang sudah ada 105 KK yang menempati (luas 8 ha letaknya 13 km dari Merapi). Terakhir di Dusun Ketingan, Sindumartani, Ngemplak sudah ada 27 KK yang menempati (luas seluas 3 ha dan 10,1 km dari puncak Merapi untuk 282 KK)

Shelter itu merupakan sumbangan dari lembaga dan instansi hingga LSM luar negeri. Perencana bangunan shelter itu berasal dari posko Jenggala. Mereka yang menjadi pendonor di antaranya stasiun televisi Media Group, TV One, Jasa Raharja, Gerakan Kemanusiaan Indonesia, BAZNAS, LSM Peduli Bangsa dan Rumah Zakat.

Huntara juga perlu dilengkapi dengan kandang ternak atau sumber mata pencaharian lainnya, pos keamanan, pos kesehatan dan shelter sekolah serta fasilitas umum lainnya. Dengan demikian kehidupan sosial ekonomi warga yang menempati shelter tersebut lambat laun akan pulih.

Terjadinya perubahan kawasan rawan bencana gunungapi Merapi, maka perlu dilakukan penataan

daerah pemukiman yang baru atau pemukiman kembali bagi warga yang rumahnya rusak. Penataan kawasan lereng Merapi dilakukan setelah kajian tata ruang merapi darurat disetujui lembaga yang berwenang. Sosialisasi terhadap rencana pemukiman kembali perlu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Rehabilitasi pemukiman merupakan kegiatan awal penataan ruang dan kawasan di lereng Merapi. Dengan mempertimbangkan faktor kejelasan status kepemilikan lahan dan daya dukung lingkungan guna memenuhi kebutuhan manusia (pemukiman, pertanian, padang rumput, fasilitas sosial dan umum serta air bersih). Dalam zona pemukiman di lereng Merapi tersebut perlu pula dilengkapi dengan petunjuk jalur-jalur evakuasi ataupun tanda-tanda guna peringatan dini sebagai antisipasi bila terjadi bencana, serta akses jalan untuk evakuasi agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan Gunung Merapi secara nyaman. Upaya mitigasi bencana dengan kearifan lokal juga perlu dihidupkan.

B. Sektor Infrastruktur

Adanya luncuran awan panas menyebabkan sarana dan prasarana publik serta fasilitas umum lainnya rusak dan tertutup material vulkanik, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya infrastruktur tersebut. Sungai-sungai yang berhulu di Merapi juga tertutup material vulkanik, yang berakibat pada tersumbatnya aliran sungai dan perlu dilakukan normalisasi sungai. Penambahan pasir terlebih dahulu ditujukan untuk normalisasi sungai tanpa merusak lingkungan, sehingga perlu pengaturan dan pengendalian. Selain itu, mengingat status Merapi masih siaga dengan curah hujan tinggi mulai Desember hingga Februari, maka perlu dilakukan kehati-hatian dalam melakukan normalisasi sungai.

Pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran air bersih, sanitasi, kelistrikan, dan fasilitas umum lainnya, perlu disikapi secara cepat baik pada masa pemulihan dini untuk kondisi darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat segera pulih.

C. Sektor Sosial

Sektor sosial yang terdiri dari sub sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk segera dilakukan *recovery*, guna menghindari ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan publik. Perawatan terhadap korban yang sakit serta pencegahan terhadap penyakit segera dilakukan sejak kegiatan tanggap darurat, terutama bagi masyarakat pengungsi agar derajat kesehatan tidak memburuk. Upaya penjaminan kesehatan bagi warga yang terkena dampak terus dilakukan guna mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

Banyaknya anak usia sekolah yang terkena dampak erupsi Merapi, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak dapat ditunda terlalu lama. Kebijakan untuk menitipkan anak usia sekolah ke sekolah yang terdekat dengan barak pengungsian dilakukan, dengan fasilitas antar jemput dari barak pengungsian ke sekolah. Shelter sekolah perlu dibangun guna menggantikan bangunan sekolah yang rusak selesai dilaksanakan. Mitigasi bencana lebih disosialisasikan melalui pendidikan kebencanaan di sekolah, sehingga pengetahuan masyarakat lereng Merapi dalam mengenal alam akan semakin meningkat.

Revitalisasi sosial kemasyarakatan dilakukan dengan memfasilitasi pembentukan RT/RW penghuni shelter, hal tersebut dimaksudkan agar budaya kebersamaan dan gotong royong tetap dipertahankan.

D. Sektor Perekonomian

Letusan Gunung Merapi ternyata sangat berdampak besar terhadap sektor perekonomian, hal ini tidak hanya dirasakan pada masyarakat yang terkena dampak langsung namun juga pada masyarakat yang terkena dampak tidak langsung. Apalagi pada saat status Merapi dinyatakan Awas maka sepanjang radius 20 km dari puncak Merapi harus mengungsi. Di samping kerugian yang bersifat fisik, letusan gunung Merapi juga telah menimbulkan kerugian akibat rusaknya proses produksi, seperti hilangnya pasar dan terputusnya saluran distribusi, kapasitas produksi yang tidak dapat berlangsung normal, dan lain sebagainya. Hal ini

tidak terlepas dari banyaknya sektor perekonomian yang berlokasi di sekitar lereng Merapi untuk menggantungkan hidupnya, misalnya peternakan sapi perah, perikanan, wisata alam, perkebunan, pertanian dan penambangan pasir. Dan potensi kerugian ini dialami oleh berbagai sektor tersebut tidak terbatas pada yang berada di dalam kawasan rawan bencana tetapi juga yang terletak di luar kawasan rawan bencana.

Pemulihan ekonomi dimulai dengan mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan perekonomian pada masyarakat pengungsi yang telah kembali ke rumah masing-masing. Program padat karya atau *cash for work* untuk pengelolaan lahan pertanian dan pembersihan lingkungan pemukiman menjadi wacana yang berkembang untuk membantu masyarakat mengurangi kerugian yang diderita akibat letusan Merapi, selain mengupayakan ganti rugi untuk mendapatkan uang tunai karena hilangnya mata pencaharian mereka. Kegiatan tersebut sangat berdampak terhadap kondisi psikologis masyarakat. sehingga masyarakat cepat bangkit dan tidak larut dalam kepedihan terus menerus.

Kebutuhan awal untuk pemulihan ekonomi bagi masyarakat Merapi antara lain menghidupkan kembali usaha lama yang tidak memerlukan pembenahan fisik terlebih dahulu, aktivitas perdagangan di pasar tradisional walaupun infrastruktur sebagian belum normal, pengadaan benih, pemberian modal/kredit lunak, alat produksi, pakan ternak, pendampingan UMKM sampai dengan pemasaran hasil produksi, serta penciptaan mata pencaharian baru dan atau dengan memanfaatkan material yang ada. Revitalisasi kelompok tani, maupun koperasi sebagai sentra pemulihan, pemberdayaan dan perwujudan kemandirian desa di sekitar lereng Merapi perlu dilakukan.

Untuk membangkitkan kembali masyarakat dari keterpurukan serta meningkatkan kunjungan wisata, maka perlu dilakukan gerakan Sleman Bangkit disamping pengembangan objek wisata lereng Merapi serta penambahan koleksi Museum Gunung Merapi.

E. Sektor Lintas Sektor

Masyarakat yang terkena dampak langsung

letusan Gunung Merapi dan sudah tidak mempunyai tempat tinggal, maka harus tinggal di shelter selama 1 tahun. Huntara atau shelter bagi pengungsi perlu dilengkapi dengan pos pengamanan, termasuk pengaturan pengelolaannya.

Dampak letusan Gunung Merapi juga berakibat rusaknya gedung kecamatan, balai desa, sekolah, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya. Agar pelayanan publik tetap berjalan, maka diupayakan keberadaannya walau hanya bersifat sementara, sambil menunggu pembangunan dan rehabilitasi. Selain itu, penyelamatan dan pergantian terhadap kearsipan dan kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan publik.

Kajian tata ruang lereng Merapi telah dilakukan oleh Tim dari Universitas Gajah Mada mengingat adanya perubahan kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Namun kajian tersebut perlu ditindaklanjuti agar mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang dan hasilnya dapat digunakan guna menetapkan tata ruang di lereng Merapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila dilihat, hasil kajian tata ruang lereng Merapi yang dilakukan oleh Tim UGM, maka perlu adanya kebijakan pemukiman kembali. Identifikasi kepemilikan tanah, penyediaan tanah, pembuatan batas tanah serta sosialisasi, perlu dilakukan sebelum pelaksanaannya. Pemerintah provinsi DIY telah membuat usulan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi kepada pemerintah pusat, dalam upaya untuk pergantian terhadap tanah hak milik warga.

Akibat letusan Gunung Merapi, menyebabkan kerusakan terhadap hutan sehingga diperlukan revitalisasi. Agar fungsi resapan air di daerah hulu tetap dipertahankan. Namun demikian harus didahului dengan penelitian terhadap tanah dan melakukan identifikasi terhadap kerusakan lingkungan, guna tindak lanjutnya.

3. MANAJEMEN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Proses penyusunan rencana aksi pada tahap awal dimulai dengan penilaian kerusakan dan kerugian

(Damage and Loss Assesment/DaLa) yang dilengkapi pula dengan Human Recovery Need Assesment (HRNA). Rencana aksi pascabencana erupsi Gunung Merapi ini disusun secara terpadu, sehingga menghasilkan dokumen rencana aksi secara menyeluruh yang dapat digunakan untuk instansi terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antar instansi maka diupayakan kecermatan dalam penyusunannya walaupun belum dilakukan secara optimal. Sumber pendanaan dalam rencana aksi dibedakan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman, APBD Provinsi DIY serta APBN lainnya. Diharapkan rencana kegiatan yang tidak dapat diakomodir oleh kabupaten dan provinsi maka dapat diusulkan ke pemerintah pusat ataupun sumber lainnya. Pendanaan harus transparan serta berkesinambungan sehingga hasil kerja menjadi efektif dan efisien.

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini belum merupakan pemulihan secara menyeluruh, mengingat status Merapi sampai dengan saat ini masih siaga. Sehingga masih dimungkinkan adanya tambahan nilai kerusakan dan kerugian. Rencana aksi ini harus segera disusun agar tidak terjadi penundaan proses pemulihan ekonomi, dan segera dapat dilaksanakan dan membantu individu maupun masyarakat menata kembali kehidupan dan mata pencahariannya. *Recovery* akan berjalan efektif jika tersedia pendanaan, pendampingan dan pengawasan yang memadai, optimalisasi sumber daya lokal, serta dukungan komitmen politik. Di dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Gunung Merapi ini, sebagian besar kegiatannya disusun berdasarkan kebutuhan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sleman. Namun demikian, terdapat pula kegiatan yang merupakan gagasan dari Pemkab Sleman yang diusulkan dari sumber dana di luar APBD Kabupaten Sleman guna mendukung upaya reahilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan *recovery* akan dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemkab Sleman dengan penanggung jawab Bupati Sleman, dibantu oleh Pemerintah provinsi DIY, pemerintah pusat/BNPB,

serta didukung oleh lembaga donor baik dari dalam dan luar negeri, swasta maupun masyarakat perorangan. SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Sleman sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya akan menindaklanjuti kegiatan dalam rencana aksi ini secara lebih rinci, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi DIY, pemerintah Pusat serta lembaga donor, swasta maupun masyarakat perorangan.

Keterlibatan masyarakat terutama untuk kegiatan pemulihan dini dilakukan dalam bentuk *cash for work* atau program padat karya, yang dilaksanakan secara gotong royong. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan ruang untuk berpartisipasi, dengan demikian masyarakat akan bangkit kembali dalam menata kehidupannya.

Target pelaksanaan kegiatan *recovery* pasca bencana erupsi gunungapi Merapi akan berakhir pada tahun 2013. Namun demikian, agar didapatkan hasil yang optimal dapat dilanjutkan sampai dengan tahun 2014. Untuk kegiatan pemulihan dini (*early recovery*) sudah dimulai pada akhir tahun 2010 bersama dengan masa tanggap darurat serta diselesaikan maksimal selama 5 bulan sejak bulan Desember 2010 – April 2011.

Setelah dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu disusun kebutuhan pemulihan jangka panjang dan transisi ke pembangunan adalah kegiatan pemulihan pasca bencana sebagai kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi yang difokuskan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, perekonomian untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bencana-bencana lain di masa yang akan datang.

Setelah itu akan dilakukan pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari sebuah siklus perencanaan, untuk mengukur dan mengendalikan pencapaian berdasarkan masukan (*input*) dan sasaran keluaran (*output*) yang dihasilkan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi ditujukan pada upaya

percepatan penyusunan kebijakan berikutnya.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini, disamping pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan pula pengawasan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaannya, agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak menimbulkan masalah.

4. PENUTUP

Erupsi Merapi yang terjadi dari bulan Oktober-November 2010 telah menelan banyak korban dan kerusakan. Hal yang menjadi ancaman selanjutnya dari bencana ini adalah bencana sekunder seperti banjir lahar dingin yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilakukan untuk mengembalikan semua aspek yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Upaya ini mencakup setor pemukiman, infrastruktur, sosial, perekonomian dan lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Taylor, Metode Penelitian Kualitatif, 2007
- UU RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
Pemerintah Kabupaten Sleman
- Wawancara dengan :
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Sleman Samsidi
Kepala Dinas PUP ESDM DIY Rani Sjamsinarsi
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Merapi, Kabupaten Sleman, Urip Bahagia
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Suyamsih.

